



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025



**KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Bangka berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bangka ini berpedoman pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas melalui media cetak maupun elektronik.

Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang memiliki perjalanan historis dan administratif yang cukup panjang dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pada awal pembentukannya, wilayah Kabupaten Bangka secara yuridis masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pembentukan berbagai daerah tingkat II di wilayah Sumatera Selatan pada masa awal konsolidasi pemerintahan daerah pascakemerdekaan. Melalui regulasi tersebut, Kabupaten Bangka secara resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah administratif yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

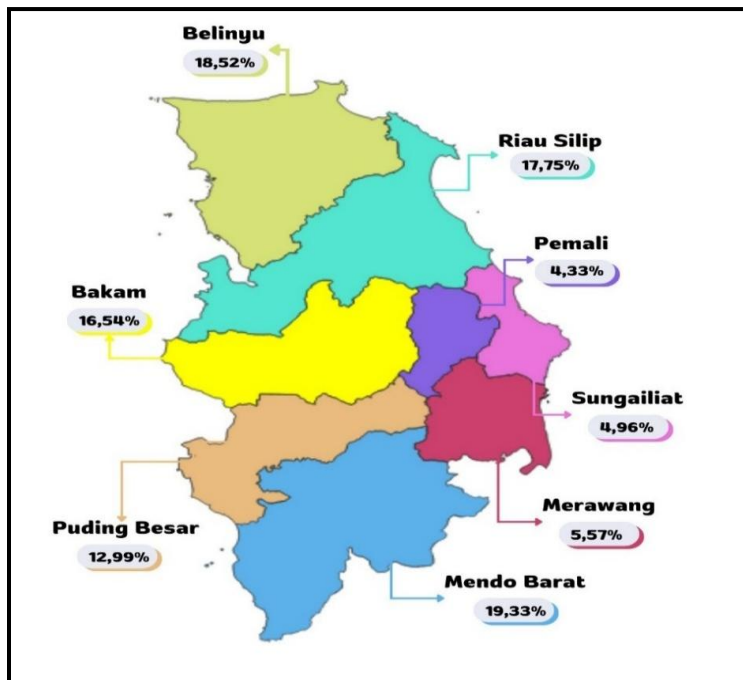
Seiring dengan dinamika perkembangan politik, ekonomi dan kebutuhan pengelolaan wilayah yang lebih efektif, muncul aspirasi masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk membentuk provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Aspirasi tersebut didorong oleh karakteristik wilayah kepulauan, potensi sumber daya alam yang besar terutama pertambangan timah serta kebutuhan percepatan pembangunan daerah. Setelah melalui proses panjang secara politik dan administratif, pemerintah pusat akhirnya menetapkan pembentukan provinsi baru melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, wilayah Kepulauan Bangka Belitung resmi menjadi provinsi tersendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai Kabupaten Bangka kembali dipertegas melalui regulasi yang lebih mutakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Undang-undang ini menjadi landasan hukum terbaru yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai kedudukan, batas wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penetapan regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penguatan aspek legal formal keberadaan Kabupaten Bangka, tetapi juga sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang terus mengalami dinamika. Dengan adanya dasar hukum yang lebih mutakhir, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai isu strategis seperti pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, dan penguatan ketahanan wilayah.

Kabupaten Bangka memiliki luas kurang lebih sebesar 3.016,85 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang;
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.



Sumber : Kabupaten Bangka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.01.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah dan Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kabupaten Bangka memiliki luas wilayah ± 3.016,85 Km², yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 62 (enam puluh dua) desa dan 19 (sembilan belas) kelurahan. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 berjumlah 337.755 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bangka seluas 3.016,85 Km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2024 sebesar 112 jiwa per km². Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebanyak 341.760 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 113 jiwa per km².

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,66	75,38	0,96
2	Persentase Penduduk Miskin	4,24	4,71	11,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91	4,75	-3,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,44	4,96	-1227,27
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	58.572	63.272	8,02
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,211	0,218	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2025

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	90,76 %	84,16 %
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,79 %	95,11 %
3.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	49,35 %	25,80 %
4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	0,00 %	56,98 %
5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	0,00 %	52,39 %

B. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan pendidikan Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Pendidikan Usia Dini	79,33 %	100,00 %
2.	Pendidikan Dasar	97,19 %	100,00 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	59,12 %	100,00 %
Urusan Pendidikan		Tuntas Muda (78,55 %)	Tuntas Paripurna (100,00 %)

C. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar Rp. 349.301.919.808,00 dengan program unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan.
- 2) Program Pengembangan Kurikulum.
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Pendidik.
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan dalam penerapan SPM yang diterapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase kematian ibu	0,00 %	0,09 %
2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0,00 %	1,07 %
3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	85,38 %	86,78 %
4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	88,52 %	90,34 %
5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	89,00 %	93,94 %
6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68,65 %	100,00 %
7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100,00 %	100,00 %
8.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	89,90 %	93,82 %
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,17 %	91,46 %
10.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	61,99 %	100,00 %

11.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100,00 %	100,00 %
12.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100,00 %	100,00 %
13.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100,00 %	100,00 %
14.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	100,00 %	100,00 %

B. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan kesehatan Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90,76 %	87,58 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,79 %	91,41 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	49,35 %	94,54 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	94,36 %	94,50 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	99,90 %	99,81 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	96,06 %	96,06 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	92,41 %	94,84 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00 %	100,00 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100,00 %	100,00 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100,00 %	100,00 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100,00 %	100,00 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100,00 %	100,00 %
Urusan Kesehatan		Tuntas Utama (95,28 %)	Tuntas Utama (96,56 %)

C. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar Rp. 304.007.576.616,46 dengan program/kegiatan unggulan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer dari fasilitas kesehatan tidak semua tepat waktu sesuai deadline yang sudah ditentukan
- 2) Terbatasnya tenaga administrasi di SPM di penyakit tidak menular hanya 2 orang.
- 3) Tenaga pemegang program Puskesmas tidak semua menguasai teknologi dan informasi.
- 4) Anggaran untuk SPM di Dinas Kesehatan dari APBD masih terbatas.
- 5) Sumber daya manusia pelaksana SPM, masih merangkap untuk beberapa program atau kegiatan.
- 6) Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk pemenuhan SPM.

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	1,35 %	67,27 %
2.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	79,33 %	100,00 %
3.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	92,04 %	93,03 %
4.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang	95,54 %	86,54 %

	mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota		
5.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	47,26 %	95,57 %
6.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	14,41 %	53,16 %
7.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0,00 %	14,41 %
8.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	27,92 %	2,17 %
9.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	0,00 %	100,00 %
10.	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00 %	76,67 %

B. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100,00 %	92,39 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100,00 %	95,66 %
Urusan Pekerjaan Umum		Tuntas Paripurna (100 %)	Tuntas Utama (94,02 %)

C. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar Rp. 30.463.624.104,25 dengan program unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pekerjaan umum di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat peningkatan penilaian kualitas akses sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, tidak ada lagi akses dasar sehingga klasifikasi akses sanitasi berupa akses layak dan akses aman.
- 2) Belum ada pendataan kembali keberfungsian unit-unit SPAL-T yang terbangun.
- 3) Terdapat peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang tidak terpelihara, rusak, dan mengalami pemutusan.
- 4) Belum ada pendataan kembali keberfungsian unit-unit SPAM yang terbangun.
- 5) Anggaran yang tersedia tidak dapat mengakomodir usulan dari pengelola SPAM.

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	0,00 %	100,00 %
2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	19,19 %	100,00 %
3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	2,69 %	3,53 %
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0,08 %	100,00 %

B. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00 %	100,00 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	100,00 %
Urusan Perumahan Rakyat		Tuntas Paripurna (100,00 %)	Tuntas Paripurna (100,00 %)

C. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar Rp. 7.732.588.219,00 dengan program unggulan yaitu Program Pengembangan Perumahan.

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 tidak terdapatnya permasalahan internal maupun eksternal.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	66,67 %	100,00 %
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100,00 %	100,00 %
3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100,00 %	100,00 %
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	8,26 %	100,00 %
5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00 %	100,00 %
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	54,28 %	76,47 %

B. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	100,00 %	96,19 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100,00 %	98,89 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00 %	98,55 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00 %	100,00 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100,00 %	100,00 %
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tuntas Paripurna (100,00 %)	Tuntas Utama (98,45 %)

C. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar Rp. 19.074.090.732,00 dengan program

unggulan sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 3) Program Penanggulangan Bencana

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 tidak terdapatnya permasalahan internal maupun eksternal.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	100,00 %
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	100,00 %
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	100,00 %
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 %	100,00 %
5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100,00 %	100,00 %
6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0,00 %	79,15

B. Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	99,69 %	99,62 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100,00 %	97,92 %
3.	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100,00 %	100,00 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	90,00 %	99,17 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00 %	92,00 %
Urusan Sosial		Tuntas Utama (97,94 %)	Tuntas Utama (97,74 %)

C. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 sebesar Rp. 9.319.739.930,00 dengan program unggulan yaitu Program Rehabilitasi Sosial

D. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama, data bisa menjadi kurang akurat karena sasaran SPM terutama gelandangan serta pengemis yang mobilitasnya sangat tinggi antar wilayah, bahkan antar kabupaten, banyak yang

belum memiliki identitas diri, terutama lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis

- 2) Pengumpulan data yang membutuhkan waktu lama, sehingga mempengaruhi dalam penghitungan kebutuhan sasara
- 3) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar yang didata tahun berjalan untuk diusulkan mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada tahun N+1, sehingga terkadang sasaran sudah tidak tepat dengan berbagai alasan.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar dihitung berdasarkan jumlah sasaran, tetapi terkendala dengan anggaran yang tersedia

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, dimana Kabupaten Bangka berhasil mendapatkan Hasil EPPD dengan skor kinerja “3,1096” dan status kinerja “SEDANG”

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 96.B/LHP/XVIII.PPG/06/2024 tanggal 23 Mei 2025, dimana Kabupaten Bangka berhasil mendapatkan Opini “WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)” Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka (*Unaudited*) Tahun 2025 dengan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 1.192.925.755.980,24 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 mencapai Rp. 1.160.141.606.442,29.

Secara rinci, Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (3/2)*100	5
PENDAPATAN DAERAH	1,184,641,848,917.00	1,192,925,755,980.24	100.69	1,268,251,881,897.22
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	209,720,085,298.00	243,059,103,573.24	115.89	193,778,804,356.22
Pajak Daerah	98,083,200,000.00	100,891,722,132.86	102.86	70,412,283,774.55
Retribusi Daerah	102,913,778,651.00	130,713,478,973.00	127.01	106,290,352,830.24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,920,076,647.00	5,920,076,646.83	99.99	7,369,115,847.42
Lain-lain PAD yang Sah	2,803,030,000.00	5,533,825,820.55	197.42	9,707,051,904.01
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	209,720,085,298.00	243,059,103,573.24	115.89	193,778,804,356.22
PENDAPATAN TRANSFER	968,467,036,497.00	943,302,374,864.00	97.40	1,074,473,077,541.00
Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	909,207,128,116.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0.00	0.00	0.00	131,911,451,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0.00	0.00	0.00	547,802,621,272.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0.00	0.00	0.00	101,694,681,362.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0.00	0.00	0.00	127,798,374,482.00
Dana Bagi Hasil (DBH)	102,137,333,000.00	99,011,123,000.00	96.93	0.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	554,827,656,000.00	546,273,554,547.00	98.45	0.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	171,168,382,000.00	164,492,085,111.00	96.09	0.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	828,133,371,000.00	809,776,762,658.00	97.78	909,207,128,116.00
Dana Desa	59,907,742,000.00	51,308,940,540.00	85.64	59,475,922,000.00
Insentif Fiskal	15,785,588,000.00	15,785,588,000.00	100.00	22,958,813,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	75,693,330,000.00	67,094,528,540.00	88.63	82,434,735,000.00

Pendapatan Transfer Antar Daerah	64,640,335,497.00	66,431,083,666.00	102.77	82,831,214,425.00
Pendapatan Bagi Hasil	59,165,099,497.00	61,004,747,666.00	103.10	77,872,214,425.00
Bantuan Keuangan	5,475,236,000.00	5,426,336,000.00	99.10	4,959,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	64,640,335,497.00	66,431,083,666.00	102.77	82,831,214,425.00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	968,467,036,497.00	943,302,374,864.00	97.40	1,074,473,077,541.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6,454,727,122.00	6,564,277,543.00	101.69	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	1,184,641,848,917.00	1,192,925,755,980.24	100.69	1,268,251,881,897.22
BELANJA DAERAH	1,228,612,070,525.65	1,160,141,606,442.29	94.42	1,258,221,056,830.05
BELANJA OPERASI	997,378,596,025.12	952,165,812,308.87	95.46	955,308,794,292.23
Belanja Pegawai	559,973,749,922.97	518,855,903,457.00	92.65	468,901,466,339.00
Belanja Barang dan Jasa	374,031,622,570.15	375,065,312,347.87	100.27	426,396,640,540.00
Belanja Subsidi	1,100,000,000.00	919,900,710.00	83.62	1,015,368,390.00
Belanja Hibah	57,232,658,032.00	52,424,465,994.00	91.59	54,300,749,456.00
Belanja Bantuan Sosial	5,040,565,500.00	4,900,229,800.00	97.21	4,694,569,567.23
JUMLAH BELANJA OPERASI	997,378,596,025.12	952,165,812,308.87	95.46	955,308,794,292.23
BELANJA MODAL	88,339,985,611.00	78,001,222,843.42	88.29	165,787,383,786.82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,490,016,406.00	27,440,880,026.71	87.14	35,561,323,174.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,256,182,385.00	26,436,323,759.46	81.95	41,086,347,735.82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19,458,858,104.00	19,192,260,953.25	98.62	84,957,344,419.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,804,067,716.00	4,720,020,054.00	98.25	4,162,666,457.08
Belanja Modal Aset Lainnya	330,861,000.00	211,738,050.00	63.99	19,702,000.00
JUMLAH BELANJA MODAL	88,339,985,611.00	78,001,222,843.42	88.29	165,787,383,786.82
BELANJA TIDAK TERDUGA	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
Belanja Tidak Terduga	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6,800,422,989.53	2,480,306,850.00	36.47	1,994,391,051.00
BELANJA TRANSFER	136,093,065,900.00	127,494,264,440.00	93.68	135,130,487,700.00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9,808,320,000.00	9,808,320,000.00	100.00	7,732,550,000.00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	776,642,800.00	776,642,800.00	100.00	896,828,300.00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125,208,103,100.00	116,609,301,640.00	93.13	126,501,109,400.00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	136,093,065,900.00	127,494,264,440.00	93.68	135,130,487,700.00
JUMLAH BELANJA	1,228,612,070,525.65	1,160,141,606,442.29	94.42	1,258,221,056,830.05
SURPLUS/DEFISIT	(43,970,221,608.65)	32,784,149,537.95	(74.55)	10,030,825,067.17
PEMBIAYAAN DAERAH	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43,970,221,608.65	43,970,221,608.65	100.00	33,120,847,861.48
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	973,012,283.00	0.00	818,548,680.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
PEMBIAYAAN NETTO	43,970,221,608.65	44,943,233,891.65	102.21	33,939,396,541.48
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	77,727,383,429.60	0.00	43,970,221,608.65

Sumber: LRA Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Unaudited)

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan *Database* Inovasi Daerah Tahun 2025 Kabupaten Bangka memiliki inovasi daerah sebagai berikut:

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Dinas Pangan dan Pertanian	Intan Bertambah Bucin (Intensifikasi Di lahan Bekas Tambang Timah Untuk Budidaya Cabe Berkelanjutan)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terasi Bangka (Pendataan Infrastruktur Terbangun Bidang Air Minum Dan	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Sanitasi)	
3	Sekretariat Daerah	Dulang Emas (Pengaduan Langsung Pelayanan Masyarakat)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
4	Inspektorat Daerah	SIMAWAS INDAH (Konsultasi Dan MedS Pengawasan Internal Daerah)	Inovasi Pelayanan Publik Digital
5	Dinas Sosial	PENTAS PEDULI (Penyandang Disabilitas Perlu Dukungan Dan Dilindungi)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Dedikasi Linmas (Deteksi Dini Keamanan Sekitar Satuan Perlindungan Masyarakat)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
7	Dinas Kesehatan	Model Konvergensi Kelembagaan Sukses Tekan Stunting Di Bangka	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
8	Dinas Kesehatan	Gerakan Kolektif Kampanye Pencegahan Angka Stunting	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
9	Dinas Kesehatan	LAPAR NGEMIL	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
10	Dinas Kesehatan	PENCET DATANG	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
11	Dinas Kesehatan	MANG ALAN (Mobil Angkutan Lansia)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
12	Dinas Kesehatan	CURHAT KEPO	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
13	Dinas Kesehatan	Rumah Singgeh Timbang Bocah Kecil "RUMEH BANG BOCIL"	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Tim Perbaikan Instalasi Jaringan (TIM PIJAR)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
15	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Data Sekolah Adiwiyata (SIDAKOTA)	Inovasi Pelayanan Publik Digital
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pesanku Kawan	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ngemal Ke Bangka (Integrasi Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bangka)	Inovasi Pelayanan Publik Digital
18	Dinas Perikanan	PASANGAN IDAMAN Menuju GERBANG PERAK "Pemanfaatan Kolong Bekas Tambang Inkonvensional Menjadi Kolam Ikan Menuju Gerakan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan")	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	GERBANG DEWI (Gerakan Bangun Desa Wisata)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rusip Bangka (Ruang Informasi Pariwisata Bangka)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
21	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan	Lampu Pelita (Layanan Diskusi, Konsultasi, Dan Mediasi Memberikan Perlindungan Yang Melibatkan Psikolog	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Perlindungan Anak	Berbagai Program Seperti Pendidikan, Kesehatan, Serta Perlindungan Anak Dan Keluarga)	
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ikan Belanak (Penyediaan Ruang Publik Untuk Mendukung Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Pelibatan Dan Pantauan Orang Tua)	Inovasi Pelayanan Publik Non Digital
23	Kelurahan Sungailait	Sungailiat APP	Inovasi Pelayanan Publik Digital

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, 2024

6. PENGHARGAAN

Penghargaan yang telah diraih Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penghargaan Tingkat Nasional

Pada Tahun 2025, Kabupaten Bangka meraih 11 (sepuluh) penghargaan tingkat nasional, yaitu:

- 1) Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional (Sinovik) Tahun 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk Inovasi Ekonomi Peka Gender Berbasis Kolaborasi dan Integrasi Sistem Industri Pangan Rumah Tangga;
- 2) Penghargaan Terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 80,74 Kategori A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, April 2025;
- 3) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Peringkat Nindya Tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Juli 2025;
- 4) Penghargaan Akselerasi Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota melalui Program Anakku Sehat dan Cerdas dari Seameo Recfon, September 2025;
- 5) Penghargaan Tim Modular Operating Theatre (MoT) Kabupaten Bangka Akselerasi Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Program Anakku Sehat dan Cerdas dari Seameo Recfon, September 2025;
- 6) Penghargaan Upaya Baik Pengendalian Stunting Kabupaten Bangka Tahun 2025 dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Oktober 2025;
- 7) Penghargaan Aids Tuberkulosis Malaria (ATM) Award 2025 Kabupaten Bangka atas Penanggulangan dan Pencegahan Aids Tuberkulosis Malaria (ATM) di Daerah dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Oktober 2025;
- 8) Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 Kabupaten Bangka sebagai Kabupaten Terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Desember 2025;
- 9) Penghargaan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2024 Untuk Kabupaten Bangka Kategori Sangat Baik (87,85) Dari BKPMRI;
- 10) Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024; dan
- 11) Penghargaan Predikat Istimewa dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HI-4.OT.03.01 Tahun 2025.

b. Penghargaan Tingkat Provinsi

Pada Tahun 2025, Kabupaten Bangka meraih 6 (enam) penghargaan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Penghargaan Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui UPT PSC 119 untuk Inovasi Layanan Untuk Semua (No One Left

Behind);

- 2) Penghargaan Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui Kelurahan Sungailiat untuk Inovasi Sungailiat App;
 - 3) Penghargaan Top 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui UPT PSC 119 untuk Inovasi Layanan Untuk Semua (No One Left Behind);
 - 4) Penghargaan Top 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui Kelurahan Sungailiat Untuk Inovasi Sungailiat App;
 - 5) Penghargaan Opinik BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 "WTP" Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mei 2025;
 - 6) Penghargaan Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2024 Terbaik II dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2025;
 - 7) Penghargaan Terbaik Pertama Paritrana Award Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kategori Pemerintah Kota/Kabupaten, Juli 2025;
 - 8) Penghargaan Pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Oktober 2025;
 - 9) Penghargaan Terbaik II Capaian Peserta Vasektomi Terbanyak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
 - 10) Penghargaan Terbaik II Kategori Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi untuk Desa Penyamun Kecamatan Pemali dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Penghargaan Tingkat Regional
- Pada Tahun 2025, Kabupaten Bangka meraih 1 (satu) penghargaan tingkat Regional yaitu Penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai Peringkat I Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indeks Inovasi Tertinggi Regional I.

SUNGAILIAT, 25 MARET 2026

BUPATI BANGKA,



FERY INSANI